



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2020

Kecamatan Sukorejo
Kota Blitar

Jl. Jati No. 123 Telp. (0342) 801371 Blitar 66121
e-mail : kec-sukorejo@blitarkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kecamatan Sukorejo Tahun 2020” dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kecamatan Sukorejo Tahun 2020 sebagai perwujudan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020. LKjiP ini memaparkan hasil evaluasi kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar di Tahun 2020 berisikan penyajian data, baik kuantitas maupun kualitas, indikator-indikator kinerja sehingga dapat dijadikan evaluasi atau tolok ukur kinerja di akhir tahun yang sangat bermanfaat untuk mengetahui capaian kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yang telah dan seharusnya dicapai dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Blitar

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini. Semoga apa yang dituangkan dalam dokumen pelaporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sukorejo Kota Blitar pada tahun berikutnya.

Blitar, Februari 2021

**CAMAT SUKOREJO
KOTA BLITAR**



IUYANTO, SE.,MM.

Pembina Tk. I

NIP. 196609211989031009

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Dasar Hukum	8
1.5. Aspek – aspek Strategis.....	9
1.6. Isu-isu Strategis.....	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategis	11
2.2. Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran.....	17
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	19
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja	24
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	30
BAB IV PENUTUP	48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Langkah Perbaikan	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	12
Tabel 2.2.	Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran	13
Tabel 2.3.	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Sukorejo 2016-2021	13
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukorejo Tahun 2020	15
Tabel 3.1.	Pencapaian Kinerja Kecamatan Sukorejo	17
Tabel 3.2.1.	Capaian Kinerja Tujuan	19
Tabel 3.2.2.	Capaian Kinerja Sasaran I	20
Tabel 3.2.3.	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	20
Tabel 3.2.4.	Capaian Kinerja Sasaran II	23
Tabel 3.3.1.	Perbandingan Realisasi Kinerja	24
Tabel 3.3.2.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020	25
Tabel 3.3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 (Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Sananwetan)	26
Tabel 3.3.4.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 (Kecamatan Sukorejo dan Nasional)	28
Tabel 3.3.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra 2016-2021	29
Tabel 3.3.6.	Alokasi Sasaran Pembangunan	29
Tabel 3.4.1.	Realisasi Anggaran Tahun 2020	30
Tabel 3.4.2.	Realisasi Anggaran Kecamatan Sukorejo Tahun 2020	31
Tabel 3.4.3.	Realisasi Anggaran Kelurahan Pakunden Tahun 2020	32
Tabel 3.4.4.	Realisasi Anggaran Kelurahan Tlumpu Tahun 2020	34
Tabel 3.4.5.	Realisasi Anggaran Kelurahan Blitar Tahun 2020	36

Tabel 3.4.6. Realisasi Anggaran Kelurahan Turi	
Tahun 2020	37
Tabel 3.4.7. Realisasi Anggaran Kelurahan Karang Sari	
Tahun 2020	39
Tabel 3.4.8. Realisasi Anggaran Kelurahan Sukorejo	
Tahun 2020	41
Tabel 3.4.9. Realisasi Anggaran Kelurahan Tanjungsari	
Tahun 2020	42
Tabel 3.4.10. Realisasi Kinerja dan Anggaran Kecamatan Sukorejo	
Kota Blitar Tahun 2020	45
Tabel 3.4.11. Pengukuran Efisiensi Kinerja dan Keuangan.....	47

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.1. Struktur Organisasi Kecamatan	2
Tabel 1.2. Susunan Organisasi Kelurahan.....	7

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam pelaporan kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban konkrit atas penyelenggaraan konkrit atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Adapun petunjuk teknis Pelaporan Kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam amanatnya menyebutkan Kepala SKPD menyusun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2020 tentunya akan berbeda nuansanya dengan tahun sebelumnya, mengingat di Tahun 2020, kita semua berada pada suasana pandemi covid 19 yang tentunya akan memberikan dampak terhadap kinerja pemerintahan. Banyak program dan kegiatan yang pelaksanaannya difokuskan untuk percepatan penanganan pandemi ini, termasuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukorejo. Namun demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi.

Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (*responsibility*) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Blitar terutama misi ke 6 yaitu, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, dan professional, yang tertuang dalam bentuk

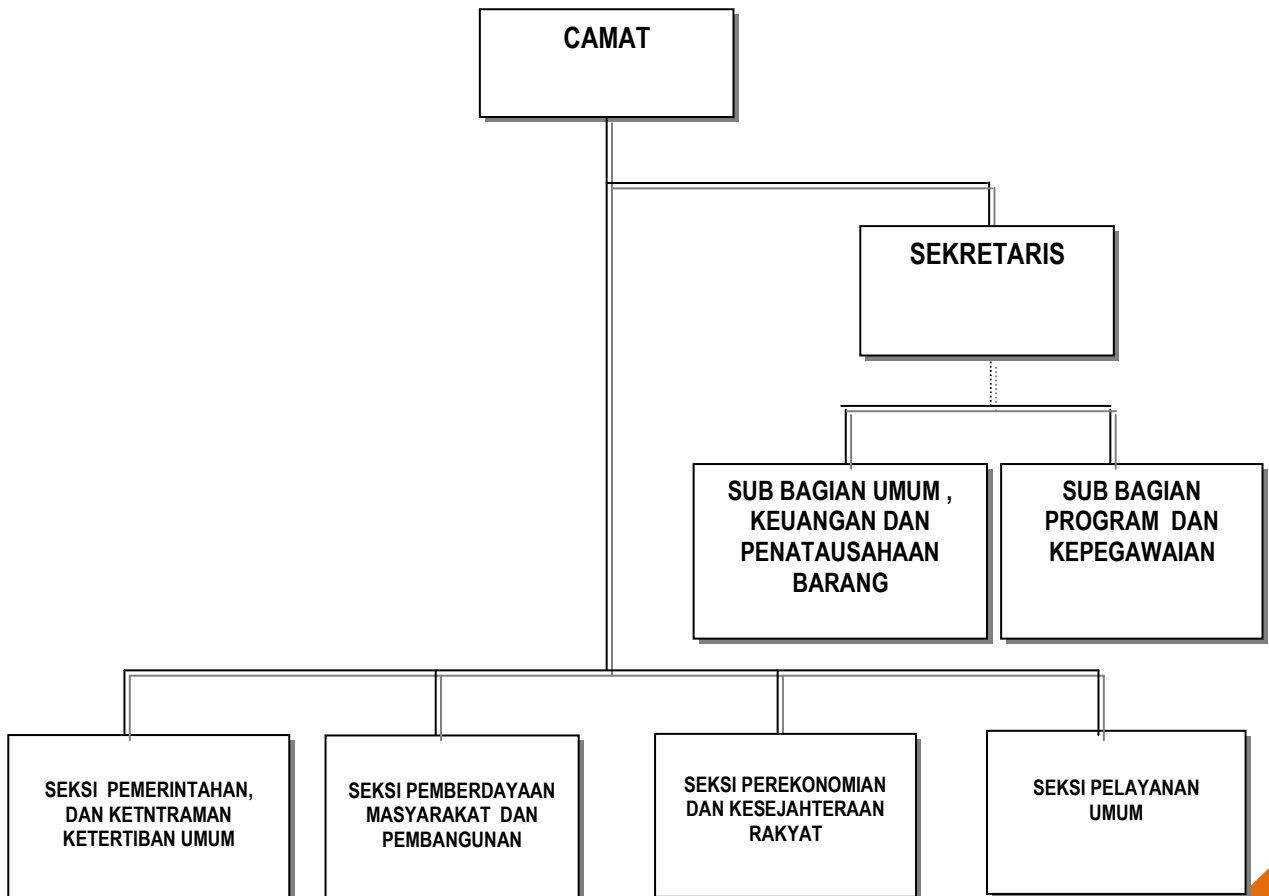
Perjanjian Kinerja kepada pemberi mandat, dalam hal ini adalah pertanggungjawaban kepada Wali Kota Blitar maupun langkah-langkah penanganan covid-19 yang telah diambil oleh Kecamatan Sukorejo.

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dalam usaha meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang didalamnya terdapat kelurahan (kelurahan merupakan bagian dari kecamatan dan bukan merupakan organisasi perangkat daerah) maka Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan kecamatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan sebagai penjabarannya telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, sesuai struktur organisasi berikut:

Gambar 1.2
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Sumber: Peraturan Wali Kota No. 77 Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan sebagaimana tersebut di atas kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

I. KECAMATAN

I.1 KEDUDUKAN KECAMATAN :

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Kota Blitar yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar.

I.2 FUNGSI KECAMATAN

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas kecamatan melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya ;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan ;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum terpadu kecamatan;
- e. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan sesuai peraturan perundangan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- g. Penyelenggaraan dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
- h. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya;
- i. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kecamatan;
- j. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- k. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- l. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- m. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- n. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- o. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- p. Pengelolaan pengaduan masyarakat;

- q. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- r. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan;
- s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

I.3 KEWENANGAN KECAMATAN

Kecamatan mempunyai kewenangan:

- a. Penetapan dan pengembangan visi, misi, tujuan, dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan di kecamatan dan kelurahan;
- b. Pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- e. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
- j. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah sesuai peraturan perundang-undangan;

- k. penyelenggaraan fasilitasi penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan kelurahan.

II. KELURAHAN

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, dapat kami uraikan sebagai berikut :

II.1 KEDUDUKAN KELURAHAN

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

II.2 STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN

Susunan Organisasi Kelurahan adalah sebagai berikut :

a) Lurah

Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Wali Kota.

b) Sekretariat

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

c) Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

d) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

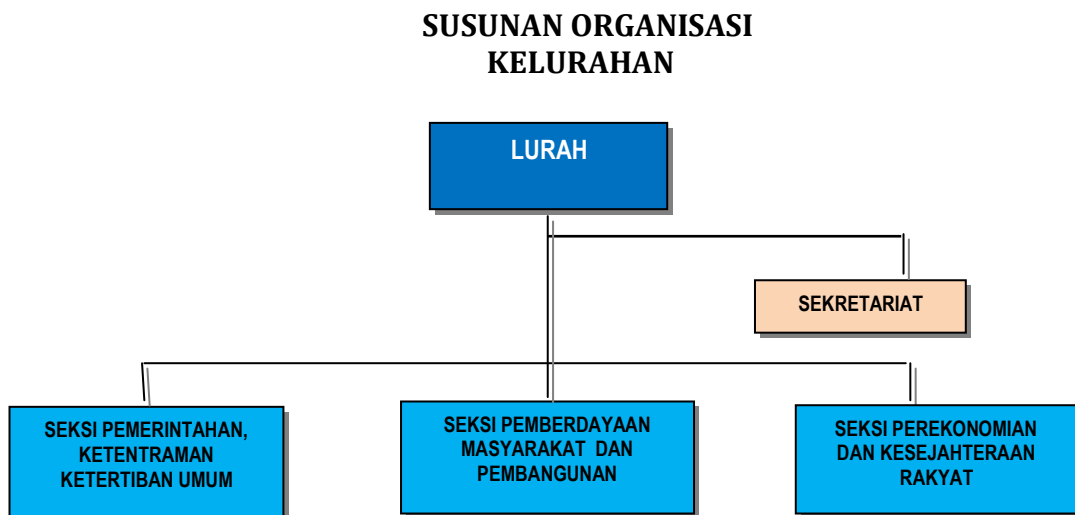
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

e) Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

f) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan dibentuk oleh Camat dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.



Sumber: Peraturan Wali Kota No. 77 Tahun 2016

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah :

1. Memberikan gambaran, penjelasan dan penyajian data baik secara kuantitas maupun kualitas potensi yang ada di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar mengenai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab instansi;
2. Sebagai pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban sekaligus sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar kepada pemerintah kota maupun masyarakat.
3. Memberikan informasi guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program pada tahun berikutnya.

4. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Wali Kota Blitar akhir tahun anggaran 2020.

Adapun tujuan disusunnya pelaporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja terukur kepada kepala daerah atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 – 2021.
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 2)

9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
10. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

1.5 ASPEK-ASPEK STRATEGIS

Terdapat beberapa faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Hal itu bisa dilihat dalam uraian dibawah ini :

Faktor Kekuatan :

1. Adanya SOP di setiap tahapan pelayanan masyarakat dan perkantoran.
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor penunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi.
3. Tingkat responsibility SDM terhadap kondisi lingkungan sangat cepat.
4. Tingkat hubungan kinerja antara kecamatan dan kelurahan sangat harmonis.
5. Penerapan teknologi informasi sangat membantu kelancaran tugas.

Faktor Kelemahan :

1. SDM yang kurang memadai dari segi kuantitas dan kualitas.
2. Tata kelola perkantoran belum mencerminkan tata kelola perkantoran modern.
3. Persepsi dan tingkat pemahaman yang berbeda terhadap peraturan.

Faktor Peluang :

1. Kebijakan kepala daerah memberikan ruang bagi kecamatan berkarya
2. Tingkat partisipatif masyarakat yang baik dalam proses pembangunan diwilayah.
3. Adanya partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
4. Sinergitas yang baik antara Forpimcam, KUA, Puskesmas, dan seluruh OPD terkait serta lembaga kemasyarakatan kelurahan.

Faktor Tantangan

1. Minimnya anggaran untuk peningkatan kapasitas (Diklat, TOT, *in house training*) bagi perangkat kecamatan.

2. Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan prima.

2 ISU-ISU STRATEGIS

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Isu-isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Sukorejo antara lain :

1. Masih rendahnya peningkatan kapasitas personil dalam melaksanakan tugas dan peningkatan pelayanan.
2. Belum optimalnya sinkronisasi tupoksi dan kewenangan antara kecamatan dengan Perangkat Daerah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan. Perencanaan kinerja juga memberikan target objektif kuantitatif tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan. Perencanaan kinerja sebagai bentuk komitmen yang menjabarkan rencana kinerja dan target kinerja tahunan yang dikomitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan strategis memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan serta isu-isu strategis, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kota Blitar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Wali Kota Blitar terpilih periode 2016-2021. Dalam rangka mewujudkan Visi **“Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021”**, Kecamatan Sukorejo Kota Blitar mendukung perwujudan Misi ke-6, yaitu: **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional”**.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja. Dalam rencana strategis Kecamatan Sukorejo Kota Blitar terdapat tujuan dan sasaran yang menjadi patokan dalam suatu kegiatan, yang diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di bidang pelayanan kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan untuk Kepuasan Masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Sukorejo	94%
		Meningkatnya Koordinasi di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/ keamanan /ketertiban/kesejahteraan sosial /pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%

Sumber: Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2016-2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dalam mendukung misi ke enam yaitu : **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional”** telah ditetapkan tujuan dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Sukorejo 2016 – 2021 yaitu ***Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan Kecamatan Sukorejo.*** Dengan indikator tujuannya ***Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Sukorejo.***

Sedangkan sasaran organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sukorejo dalam mengemban visi dan misi organisasi adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan untuk Kepuasan Masyarakat.
2. Meningkatnya Koordinasi di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah

Untuk mencapai sasaran diperlukan strategi dan kebijakan yang harus dilakukan:

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran

Misi VI: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan Sukorejo	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat	Mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana yang representatif
	Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Mengoptimalkan koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah dan menindaklanjuti	Meningkatkan sinergitas dengan OPD lain

Sumber : Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2016-2021

Sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode renstra Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Kecamatan Sukorejo 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan
1	2	3
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan kecamatan	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan untuk kepuasan masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan/Kelurahan
	2. Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (DAU Tambahan)

Selain program dan kegiatan di atas, program dalam Urusan Administrasi Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukorejo adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja merupakan lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari Wali Kota atau Bupati sebagai pemberi amanah kepada pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan wujud komitmen dan kesepakatan antara kepala daerah sebagai pemberi amanah dan pimpinan OPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Perjanjian Kinerja fokus mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah dengan Wali Kota Blitar sebagaimana terlampir. Perjanjian kinerja didasarkan pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah dituangkan dalam rencana kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Kecamatan Sukorejo

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Baik
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Sukorejo	94%
3	Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Persentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan/ keamanan/ ketertiban/ kesejahteraan sosial/ pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Persentase pelayanan tepat waktu	94%
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pemerintah dan pembangunan	Persentase pembinaan di bidang Pemerintah, Keamanan dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Perkantoran	Rp 3.563.325.186,04	APBD
2	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Rp 92.551.450,00	APBD
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp 21.650.200,00	APBD
4	Program Peningkatan Kualitas Kecamatan Dan Kelurahan	Rp 669.414.700,00	APBD

5	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dan Pembangunan	Rp	9.221.828.938,00	APBD
	JUMLAH	Rp.	13.568.770.474,04	

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Camat Sukorejo Tahun 2020

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. Sebagaimana Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan MENPAN dan RB No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka organisasi perangkat daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Agar memudahkan pemahaman mengenai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2020, maka secara sistematis akan diuraikan tentang pengukuran kinerja, diikuti dengan evaluasi kinerja, dan uraian akuntabilitas kinerja, yang secara rinci sebagai berikut :

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA / SASARAN

Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja utama dan sasaran strategis. Hasil dari pengukuran kinerja tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian IKU dan sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Adapun capaian kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2020

Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan Sukorejo	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Sukorejo	Baik (87)	Baik (90,22)	Baik (102%)
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Sukorejo	94%	100%	106%
Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/keamanan/ketertiban/kesejahteraan sosial/ pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Persentase pelayanan tepat waktu	94%	100%	106%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan	Persentase pembinaan di bidang Pemerintahan, Keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja Camat Sukorejo Tahun 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa Kecamatan Sukorejo memiliki Indikator Kinerja Utama yang merupakan Indikator Tujuan yaitu: “Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan Sukorejo” dengan indikatornya tercapainya nilai baik pada Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan. Terdapat 2 (dua) Sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sukorejo antara lain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat;
2. Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorejo “Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan” dengan indikator kinerjanya “Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan” bernilai baik. Maka pada setiap tahunnya Kecamatan Sukorejo rutin melakukan pengukuran kualitas pelayanan publiknya melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang rutin dilaksanakan pada Tribulan I dan proses analisisnya pada Tribulan II.

Tabel 3.2.1
Capaian Kinerja Tujuan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Baik (87)	Baik (90,22)	baik

Sumber: Hasil Survey Kepuasan Kecamatan Sukorejo Tahun 2020

Dari tabel tersebut dapat diketahui Kecamatan Sukorejo Kota Blitar memiliki 1 (satu) Tujuan yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan Sukorejo” , dengan indikator: Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Sukorejo. Dalam Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017, SKM memiliki 9 (sembilan) unsur yang "relevan", "valid" dan "reliabel", sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran survey kepuasan masyarakat yang meliputi :

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya (nilai 86,00);
2. Kemudahan prosedur pelayanan (nilai 87,62);
3. Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan (nilai 87,62);

4. Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan (nilai 100);
5. Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan (nilai 86,50);
6. Kemampuan/kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan (nilai 90,12);
7. Perilaku petugas dalam memberikan pelayanan terkait dengan kesopanan dan keramahan (nilai 90,62);
8. Kualitas sarana dan prasarana (nilai 96,00);
9. Penanganan pengaduan pengguna layanan (nilai 88,00).

Dari ke sembilan unsur layanan tersebut nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan Sukorejo pada tahun 2020 adalah **90,22**. Nilai tersebut termasuk dalam kategori **“SANGAT BAIK”** sesuai dengan tabel dibawah ini :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sedangkan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja (sasaran strategis) dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penjelasan atas capaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

- **SASARAN I** : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan untuk Kepuasan Masyarakat

Dengan menghitung persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Sukorejo,

Formulasi Persentase masyarakat yang puas adalah sbb :

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat pencari pelayanan yang puas terhadap pelayanan}}{\text{Jumlah masyarakat pencari layanan}} \times 100\%$$

Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Sukorejo target 94%. Pengukuran dari sasaran 1 ini didasarkan pada buku pelayanan yang diisi oleh setiap masyarakat pencari pelayanan di Kecamatan Sukorejo. Pada tahun 2020, dari 2.741 pencari pelayanan, dengan rincian 2.741 orang merasa puas dan 0 orang yang merasa tidak puas. Sehingga realisasi pada tahun 2020 adalah :

$$\frac{2741}{2741} \times 100\% = 100\%$$

Indikator keberhasilan sasaran I, target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.2
Capaian Kinerja Sasaran I

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan kecamatan	94%	100%	106,4 %

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja Camat Sukorejo Tahun 2020

Kepuasan masyarakat sangat baik, sebesar 106,4% nilai tersebut telah melampaui target. Untuk mengukur pencapaian atas sasaran tersebut, berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2020 telah ditetapkan indikator kinerja strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya yakni dengan melaksanakan penghitungan persentase kepuasan masyarakat yang selama ini tercatat pada anjungan layanan yang ada di ruang pelayanan. Setiap selesai menerima layanan, maka diwajibkan mengisi survey kepuasan sehingga dapat diketahui jumlah pengguna layanan yang puas dan tidak puas terhadap layanan yang diberikan perangkat kecamatan.

Sedangkan perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.3
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			2019	2020	2019	2020
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan untuk Kepuasan Masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan kecamatan	92%	94%	93%	100%

Sumber : Evaluasi Kinerja Kecamatan Sukorejo 2020

Selama Tahun 2020 masyarakat pencari layanan di Kecamatan Sukorejo adalah sebanyak 2.741 orang. Dari data tersebut semua masyarakat pencari layanan merasa puas, yaitu sebanyak 2.741 orang. Dalam Persentase, kualitas pelayanan administrasi kecamatan Sukorejo bernilai 100% yang berarti bahwa kinerja unit pelayanan sangat baik. Apabila kita bandingkan dengan data di Tahun 2019, maka di Tahun 2020 jumlah masyarakat yang melakukan permohonan layanan menurun dibanding 2019. Dari data seksi pelayanan menunjukkan bahwa di Tahun 2019 terdapat 3.806 orang yang melakukan permohonan layanan di Kecamatan Sukorejo. Dari jumlah tersebut terdapat 243 pencari yang tidak puas dengan layanan Kecamatan Sukorejo. Salah satu penyebab adanya penurunan angka masyarakat yang meminta pelayanan di Kecamatan Sukorejo pada tahun 2020 karena masa pandemi covid-19. Namun tingkat kepuasan justru meningkat, selama masa pandemi covid-19 layanan diberikan dengan protokol kesehatan yang baik sehingga pengguna layanan dan pemberi layanan memiliki rasa aman dan nyaman. Melalui SOP kedatangan tamu/pengguna layanan ini maka kepastian keamanan dari resiko penularan dan penyebaran covid-19 pengguna layanan merasa puas. Selain itu adanya Standar Pelayanan disetiap layanan, mulai kepastian persyaratan, kepastian waktu selesainya, kepastian produk layanan dapat diukur dan diketahui oleh penerima layanan.

Prosentase penurunan angka masyarakat yang tidak puas dengan layanan Kecamatan Sukorejo dapat diperhatikan dari 9 indikator Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2017 yang digunakan sebagai acuan pengukuran kualitas layanan sebagai berikut :

1. Persyaratan

Berdasarkan survey yang dilakukan maka masyarakat merasa jelas dengan persyaratan setiap proses layanan yang diberikan serta tidak terlalu sulit untuk memenuhi persyaratan tersebut

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan telah terinformasikan ke media-media (leaflet, anjungan layanan kecamatan serta media sosial yang mudah diakses baik website, instagram, facebook, whatsapp) yang ada sehingga memudahkan seluruh warga masyarakat diwilayah Kecamatan Sukorejo dalam mencari layanan.

3. Waktu Penyelesaian

Standar Pelayanan masing-masing jenis layanan telah tersusun sehingga memberikan kepastian waktu penyelesaian dari setiap jenis pelayanan sehingga kepastian waktu pelayanan dapat dijamin.

4. Biaya/Tarif *)

Seluruh layanan yang diberikan di Kecamatan Sukorejo tidak dikenakan biaya atau tarif, sehingga layanan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan tanpa melihat golongan ekonomi.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Sehubungan dengan Standar Pelayanan setiap jenis layanan telah tersusun maka keluaran setiap jenis layanan dapat diketahui dan sesuai dengan yang ditetapkan.

6. Kompetensi Pelaksana

Tidak dipungkiri bahwa sampai saat ini jumlah komposisi pegawai disetiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar mengalami kekurangan dari segi kuantitas dan kualitas, termasuk dalam hal ini Kecamatan Sukorejo. Namun untuk meminimalisir kekurangan tersebut terutama tenaga pelayanan, maka langkah di Kecamatan Sukorejo yaitu melalui penetapan Standar Pelayanan, pelatihan untuk petugas pelayanan.

7. Perilaku Pelaksana

Untuk meningkatkan etika serta estetika petugas pelayanan yang ada di Kecamatan Sukorejo, maka dilaksanakan secara rutin pelatihan peningkatan kualitas layanan masyarakat.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Untuk mewujudkan pelayanan yang responsif, maka ruang pelayanan di Kecamatan Sukorejo telah memfasilitasi adanya link aduan yang dapat diakses melalui whatsapp, instagram, facebook, website, email dan telepon serta adanya anjungan layanan yang didalamnya menampung seluruh saran serta kritikan dari pencari layanan.

9. Sarana dan prasarana

Sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, tentunya seluruh sarana prasarana pendukung layanan harus memenuhi syarat. Secara berkelanjutan dilaksanakan pemeliharaan sarana prasarana pendukung layanan kepada masyarakat baik sarana prasarana utama maupun penunjang, termasuk pemeliharaan pada software penunjang layanan.

Merujuk terhadap kesembilan unsur tersebut, dapat diidentifikasi kondisi pelayanan publik di Kecamatan Sukorejo, permasalahan, dan solusi agar ke depan pelaksanaan pelayanan bisa berjalan lebih baik.

- **SASARAN II** : Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah

Indikator keberhasilan sasaran II, target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.4
Capaian Kinerja Sasaran II

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan & ketertiban, kesejahteraan sosial & pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja Camat Sukorejo Tahun 2020

Indikator kedua yaitu persentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan & ketertiban, kesejahteraan sosial & pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti adalah hasil dari penghitungan

jumlah hasil koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan & ketertiban, kesejahteraan sosial & pembangunan di wilayah yang ditindak lanjuti dalam satu tahun dibagi jumlah semua koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan & ketertiban, kesejahteraan sosial & pembangunan di wilayah dalam satu tahun yang selanjutnya dikalikan 100%.

Realisasi capaian indikator kedua untuk tahun 2020 ini adalah 100%. Dimana jumlah surat undangan masuk 839 dan surat undangan keluar 282 yang ketika dijumlahkan menghasilkan 1.121 koordinasi dan kesemuanya telah ditindaklanjuti dengan baik. Menunjukkan bahwasanya selama Tahun 2020 Kecamatan Sukorejo telah menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan dalam mengadakan dan menghadiri kegiatan koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan & ketertiban, kesejahteraan sosial & pembangunan di wilayah serta melakukan upaya tindak lanjut sebagai hasil dari koordinasi tersebut. Data yang diambil bersumber dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan OPD lain maupun berhubungan dengan masyarakat yang telah dilaksanakan.

Bila kita perhatikan tabel 3.2.4, maka kunci keberhasilan tercapainya target pada indikator kinerja yang kedua ini, yaitu :

1. Aktif dan responsif terhadap permasalahan yang muncul, sehingga dapat segera melakukan koordinasi dengan perangkat kecamatan, pemeliharaan terhadap *Software* maupun *hardware* dalam hal pelayanan terhadap masyarakat dapat dipenuhi semua. Seperti halnya Standart Pelayanan, pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, sarana prasarana pendukung layanan serta mampu berimprovisasi dengan perkembangan jaman. Terkait dengan improvisasi dengan perkembangan jaman yaitu dalam pelayanan di Tahun 2020, Kecamatan Sukorejo memanfaatkan media sosial seperti *facebook*, *Instagram*, dan *WhatsApp* dalam menyampaikan seluruh jenis layanan yang ada di Kecamatan Sukorejo.
2. Hubungan serta koordinasi dengan lintas sektor seperti perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kota Blitar maupun instansi vertikal yang ada kaitan dengan tugas pokok fungsi kecamatan (TNI dan POLRI) dapat terjalin dengan baik. Hal ini terwujud dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan rutin yang diselenggarakan untuk mempererat hubungan antara masing-masing

instansi ini seperti kegiatan forum pimpinan kecamatan, FKUB dan FKDM yang mana forum-forum ini diselenggarakan untuk membahas setiap permasalahan-permasalahan yang muncul maupun antisipasi kejadian yang akan ditimbulkan.

3.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

Capaian Kinerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2020 apabila dibandingkan dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			2019	2020	2019	2020
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Baik (85)	Baik (87)	Baik (86,50)	Baik (90,22)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan untuk Kepuasan Masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan kecamatan	92%	94%	93%	100%
3	Meningkatnya koordinasi dibidang pemerintahan dan pembangunan diwilayah	Persentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan diwilayah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas untuk sasaran strategis yang pertama terdapat peningkatan nilai realisasi dari tahun 2019 sampai dengan 2020 Hal ini menunjukkan bahwa ada keseriusan dari Kecamatan Sukorejo untuk memperbaiki proses pelayanan

yang ada. Sesuai dengan rekomendasi dari hasil survey IKM menyebutkan bahwa diperlukan Untuk meningkatkan nilai pelayanan maka diperlukan pelayanan berbasis IT sampai tingkat kelurahan guna meminimalisir persyaratan dan prosedur pengajuan layanan selain itu perlu adanya kegiatan rutin yang sifatnya motivasi kepada petugas layanan kecamatan guna peningkatan kompetensi setiap petugas. Secara umum pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Sukorejo berbasis IT, namun belum maksimal. Artinya pencari masih menuju ke petugas layanan guna mendapatkan layanan, seharusnya dengan digunakannya IT maka pencari tidak perlu mendatangi pemberi layanan, sehingga meminimalisir resiko kecelakaan bila pencari harus mendatangi petugas layanan di kecamatan. Oleh karena itu embrio aplikasi pelayanan berbasis sistem yaitu SIMAYA PERGI perlu dimaksimalkan dan diterapkan di 7 (tujuh) kelurahan dan kecamatan dalam memberikan pelayanan. Selain Aplikasi Simaya Pergi, terdapat pula aplikasi SILPUSITRON yang memudahkan input data masyarakat pencarian persuratan. Dari aplikasi SILPUSITRON menghasilkan output surat yang lebih efektif, dan efisien.

Sedangkan untuk sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan diwilayah yang dinilai dari persentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan wilayah maka selama tahun 2019 sampai dengan 2020 capaiannya 100%, yang artinya seluruh koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat terselesaikan seluruhnya.

Tabel 3.3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020
(Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Sananwetan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KECAMATAN SUKOREJO				KECAMATAN SANANWETAN			
			TARGET		REALISASI		TARGET		REALISASI	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	Baik
2	Meningkatnya Kualitas	Persentase masyarakat	92	94	93	100	92	95	92	95

	Pelayanan Kecamatan untuk Kepuasan Masyarakat	yang puas terhadap layanan kecamatan									
3	Meningkatnya koordinasi dibidang pemerintahan dan pembangunan diwilayah	Persentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintaha, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan social dan pembangunan diwilayah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Apabila diperhatikan data di atas, maka realisasi target Kecamatan Sukorejo di bawah Kecamatan Sananwetan, namun bila dianalisa lebih mendalam peningkatan prosentase capaian target dari tahun 2019 ke tahun 2020 lebih tinggi Kecamatan Sukorejo sebesar 5%. Terlepas data tersebut maka dapat dibaca bahwa kedua kecamatan yang ada di Kota Blitar ini serius dalam melaksanakan 9 (indikator) pelayanan yang tertuang dalam survey IKM.

Sesuai data di atas maka kedua kecamatan terkait koordinasi bidang pemerintahan, ketertiban dan pemberdayaan masyarakat dapat terpenuhi seluruhnya di tahun 2019 dan 2020. Hal ini menunjukkan keseriusan perangkat di dua kecamatan ini dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat maupun permintaan dari instansi terkait lainnya.

Tabel 3.3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020
(Kecamatan Sukorejo dan Nasional)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KECAMATAN SUKOREJO				NASIONAL			
			TARGET		REALISASI		TARGET		REALISASI	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	baik	baik	Baik	baik				
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan untuk Kepuasan Masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan kecamatan	92	94	93	100	-	-	-	-
3	Meningkatnya koordinasi dibidang pemerintahan dan pembangunan diwilayah	Persentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan diwilayah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-

Tabel 3.3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra 2016-2021

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi sd 2020	Tingkat kemajuan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Baik (89)	Baik (90,22)	101,3%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan untuk Kepuasan Masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan kecamatan	94%	100%	106,4%
Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Persentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan & ketertiban, kesejahteraan sosial & pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Untuk persentase anggaran pada sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.6
Alokasi Sasaran Pembangunan

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Persentase Anggaran
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Rp 669.414.700,00	4,93%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan untuk Kepuasan Masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan kecamatan		
Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Persentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan & ketertiban, kesejahteraan sosial	Rp. 9.221.828.938,00	67,96%

	& pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti		
--	-----------------------------------------------	--	--

Sumber: Data BPKAD Kota Blitar Tahun 2020

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2020 Kecamatan Sukorejo beserta kelurahannya didukung dengan anggaran sebesar Rp **13.568.770.474,04** dan terserap sebesar Rp **13.114.995.937,20** atau dengan presentase serapan anggaran pada tahun 2020 sebesar 96,66%. Besarnya nilai serapan menunjukkan bahwa Kecamatan Sukorejo telah berhasil melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan sangat baik. Adapun rincian realisasi anggaran di Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.4.1
Realisasi Anggaran Tahun 2020

No	Nama Kegiatan	Total Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Program Pelayanan Perkantoran	3.563.325.186,04	3.407.126.729,20	95,62
2	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	92.551.450,00	88.153.700,00	95,25
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	21.650.200,00	21.641.200,00	99,96
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan	669.414.700,00	633.235.100,00	94,60
5	Program peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan	9.221.828.938,00	8.964.839.208,00	97,21
TOTAL		13.568.770.474,04	13.114.995.937,20	96,66

Sumber: Data BPKAD Kota Blitar Tahun 2020

Adapun rincian pagu anggaran dan realisasi per kegiatan dari kecamatan beserta kelurahan se Kecamatan Sukorejo dapat kita perhatikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4.2
Realisasi Anggaran Kecamatan Sukorejo Tahun 2020

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	1.436.698.034,04	1.422.498.327,20	99,01%
1	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	141.235.671,00	140.741.400,00	99,65%
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	54.788.400,00	53.265.450,00	97,22%
3	Penyediaan Jasa Perkantoran	330.053.158,04	330.053.142,20	100,00%
4	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	899.644.905,00	887.472.035,00	98,65%
5	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	6.775.900,00	6.766.300,00	99,86%
6	Penyusunan Laporan Keuangan	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00%
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	34.986.450,00	34.972.700,00	99,96%
7	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	32.398.950,00	32.385.200,00	99,96%
8	Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	2.587.500,00	2.587.500,00	100,00%
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9.819.400,00	9.819.300,00	100,00%
9	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	9.819.400,00	9.819.300,00	100,00%
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	315.991.550,00	315.977.750,00	100,00%
10	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan/Kelurahan	315.991.550,00	315.977.750,00	100,00%

V	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	3.068.156.100,00	2.975.391.742,00	96,98%
11	Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	494.216.500,00	483.811.300,00	97,89%
12	Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	84.748.500,00	84.426.100,00	99,62%
13	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	2.489.191.100,00	2.407.154.342,00	96,70%
JUMLAH		4.865.651.534,04	4.758.659.819,20	97,80%

Sumber: Data BPKAD Kota Blitar Tahun 2020

Secara umum realisasi anggaran untuk Kecamatan Sukorejo adalah sebesar 97,80%. Permasalahan pada Kecamatan Sukorejo tidak maksimalnya penyerapan anggaran antara lain:

1. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah tidak terserap karena masih dalam kondisi pandemi covid-19 dan selama tahun 2020 beberapa kali terdapat Surat Edaran Wali Kota Blitar terkait pembatasan perjalanan ke Luar Daerah.
2. Persentase Realisasi tidak maksimal karena Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran karena pembiayaan rutin seperti tagihan air, listrik, telepon dan internet sesuai kebutuhan.
3. Persentase Realisasi tidak maksimal pada kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan terkait pada kegiatan pembangunan fisik konstruksi yang nilai disesuaikan kondisi riil pengadaan konstruksi.

Tabel 3.4.3
Realisasi Anggaran Kelurahan Pakunden Tahun 2020

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	305.041.200,00	280.309.151,00	91,89%
1	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	22.113.000,00	20.848.000,00	94,28%
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	0,00	0,00	0,00%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
3	Penyediaan Jasa Perkantoran	0,00	0,00	0,00%
4	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	281.393.200,00	257.926.151,00	91,66%
5	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	715.000,00	715.000,00	100,00%
6	Penyusunan Laporan Keuangan	820.000,00	820.000,00	100,00%
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	9.300.000,00	6.916.000,00	74,37%
7	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	9.300.000,00	6.916.000,00	74,37%
8	Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00%
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	842.100,00	842.100,00	100,00%
9	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	842.100,00	842.100,00	100,00%
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	81.130.800,00	57.780.800,00	71,22%
10	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan/Kelurahan	81.130.800,00	57.780.800,00	71,22%
V	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	961.860.200,00	947.701.500,00	98,53%
11	Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	81.761.300,00	77.411.100,00	94,68%
12	Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	123.554.100,00	122.844.000,00	99,43%
13	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	406.544.800,00	406.041.400,00	99,88%
14	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (DAU Tambahan)	350.000.000,00	341.405.000,00	97,54%
JUMLAH		1.358.174.300,00	1.293.549.551,00	95,24%

Sumber: Data BPKAD Kota Blitar Tahun 2020

Secara umum realisasi anggaran untuk kelurahan Pakunden adalah sebesar 95,24%. Permasalahan pada Kelurahan Pakunden tidak maksimalnya penyerapan anggaran antara lain:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan/Kelurahan tidak terserap maksimal untuk pembiayaan Fasilitas Nikah Gratis, karena jumlah pasangan yang menikah di bawah target.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum tidak terserap pada anggaran Lomba TPS karena belanja lomba TPS sesuai riil kebutuhan.
3. Persentase Realisasi tidak maksimal karena Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran karena pembiayaan rutin seperti tagihan air, listrik, telepon dan internet sesuai kebutuhan.
4. Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian utamanya pada fasilitasi keikutsertaan pada even daerah tidak terserap maksimal karena sesuai edaran WaliKota Blitar tentang penerapan pembatasan kegiatan masyarakat dimaksudkan untuk mengurangi mobilitas sehingga dapat menekan penyebaran penularan covid-19

Tabel 3.4.4
Realisasi Anggaran Kelurahan Tlumpu Tahun 2020

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	240.688.044,00	233.069.696,00	96,83%
1	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	44.699.844,00	44.103.044,00	98,66%
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	0,00	0,00	0,00%
3	Penyediaan Jasa Perkantoran	0,00	0,00	0,00%
4	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	194.665.400,00	187.643.852,00	96,39%
5	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	551.200,00	551.200,00	100,00%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
6	Penyusunan Laporan Keuangan	771.600,00	771.600,00	100,00%
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%
7	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%
8	Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00%
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	606.000,00	606.000,00	100,00%
9	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	606.000,00	606.000,00	100,00%
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	19.333.250,00	16.333.250,00	84,48%
10	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan/Kelurahan	19.333.250,00	16.333.250,00	84,48%
V	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	769.487.638,00	741.326.731,00	96,34%
11	Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	67.438.750,00	63.398.750,00	94,01%
12	Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	102.536.700,00	98.679.300,00	96,24%
13	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	249.512.188,00	244.370.900,00	97,94%
14	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (DAU Tambahan)	350.000.000,00	334.877.781,00	95,68%
JUMLAH		1.039.114.932,00	1.000.335.677,00	96,27%

Sumber: Data BPKAD Kota Blitar Tahun 2020

Secara umum realisasi anggaran untuk kelurahan Tlumpu adalah sebesar 96,27%. Untuk kegiatan yang serapannya rendah antara lain:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan/Kelurahan Kegiatan ini terealisasi sebesar 84,48% terdapat alokasi pembiayaan nikah gratis. Di tahun

- 2020 angka pasangan menikah lebih rendah daripada target.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum tidak terserap maksimal terkait turunnya jumlah peserta rapat koordinasi trantibum yang dilibatkan karena mengacu pada aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
 3. Kegiatan Pengelolaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (DAU Tambahan) sesuai dengan nilai riil belanja modal konstruksi yang dilaksanakan.
 4. Persentase Realisasi tidak maksimal karena Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran karena pembiayaan rutin seperti tagihan air, listrik, telepon dan internet sesuai kebutuhan.

Tabel 3.4.5
Realisasi Anggaran Kelurahan Blitar Tahun 2020

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	163.242.900,00	162.115.318,00	99,31%
1	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	16.504.600,00	16.204.600,00	98,18%
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	0,00	0,00	0,00%
3	Penyediaan Jasa Perkantoran	0,00	0,00	0,00%
4	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	141.325.600,00	140.498.018,00	99,41%
5	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	2.912.700,00	2.912.700,00	100,00%
6	Penyusunan Laporan Keuangan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
7	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
8	Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
9	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	25.988.500,00	25.588.500,00	98,46%
10	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan/Kelurahan	25.988.500,00	25.588.500,00	98,46%
V	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	830.590.200,00	793.519.554,00	95,54%
11	Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	139.101.400,00	135.581.454,00	97,47%
12	Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	123.574.800,00	91.548.900,00	74,08%
13	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	217.914.000,00	217.507.200,00	99,81%
14	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (DAU Tambahan)	350.000.000,00	348.882.000,00	99,68%
JUMLAH		1.032.821.600,00	994.223.372,00	96,26%

Sumber: Data BPKAD Kota Blitar Tahun 2020

Secara umum realisasi anggaran untuk kelurahan Blitar adalah sebesar 96,26% untuk kegiatan yang paling rendah capaian targetnya adalah kegiatan Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 74,08% karena dalam kegiatan tersebut terdapat fasilitasi kegiatan grebeg suro yang tidak terealisasi karena tahun 2020 kegiatan tersebut ditiadakan dan kegiatan bersih desa yang dikemas lebih sederhana sesuai edaran Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Tabel 3.4.6
Realisasi Anggaran Kelurahan Turi Tahun 2020

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	237.533.945,00	224.296.330,00	94,43%
1	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	37.124.400,00	34.117.400,00	91,90%
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	0,00	0,00	0,00%
3	Penyediaan Jasa Perkantoran	0,00	0,00	0,00%
4	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	199.497.545,00	189.266.930,00	94,87%
5	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	486.000,00	486.000,00	100,00%
6	Penyusunan Laporan Keuangan	426.000,00	426.000,00	100,00%
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
7	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
8	Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00%
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	607.000,00	607.000,00	100,00%
9	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	607.000,00	607.000,00	100,00%
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	38.013.900,00	31.413.900,00	82,64%
10	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan/Kelurahan	38.013.900,00	31.413.900,00	82,64%
V	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	739.817.900,00	722.092.916,00	97,60%
11	Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	58.469.000,00	58.079.100,00	99,33%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
12	Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	79.646.800,00	77.006.400,00	96,68%
13	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	251.702.100,00	238.364.800,00	94,70%
14	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (DAU Tambahan)	350.000.000,00	348.642.616,00	99,61%
JUMLAH		1.018.472.745,00	980.910.146,00	96,31%

Sumber: Data BPKAD Kota Blitar Tahun 2020

Secara umum realisasi anggaran untuk kelurahan Turi adalah sebesar 96,31%. Permasalahan pada Kelurahan Turi tidak maksimalnya penyerapan anggaran antara lain:

1. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan tercapai 91,90% karena pada pembiayaan rutin seperti tagihan belanja Surat Kabar/Majalah sesuai dengan nilai belanja dan Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang terkendala proses pengajuan SK di Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar.
2. Kegiatan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran sebesar 94,87% dengan uraian anggaran yang tersisa adalah dana Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa dan Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa, yang terkendala proses pengajuan SK di Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar serta pembiayaan rutin seperti tagihan air, listrik, telepon dan internet sesuai kebutuhan.
3. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan/Kelurahan Kegiatan ini terealisasi sebesar 82,64% terdapat alokasi pembiayaan nikah gratis. Di tahun 2020 angka pasangan menikah lebih rendah daripada target.

Tabel 3.4.7
Realisasi Anggaran Kelurahan Karang Sari Tahun 2020

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	270.419.380,00	263.992.175,00	97,62%
1	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	75.407.400,00	75.384.850,00	99,97%
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	0,00	0,00	0,00%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
3	Penyediaan Jasa Perkantoran	0,00	0,00	0,00%
4	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	190.946.980,00	184.542.325,00	96,65%
5	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	1.833.000,00	1.833.000,00	100,00%
6	Penyusunan Laporan Keuangan	2.232.000,00	2.232.000,00	100,00%
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	10.150.000,00	10.150.000,00	100,00%
7	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	10.150.000,00	10.150.000,00	100,00%
8	Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00%
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	2.842.800,00	2.842.800,00	100,00%
9	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	2.842.800,00	2.842.800,00	100,00%
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	53.029.600,00	51.479.600,00	97,08%
10	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan/Kelurahan	53.029.600,00	51.479.600,00	97,08%
V	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	805.691.400,00	802.380.565,00	99,59%
11	Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	102.945.700,00	102.671.850,00	99,73%
12	Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	102.111.500,00	99.078.515,00	97,03%
13	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	250.634.200,00	250.634.200,00	100,00%
14	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (DAU Tambahan)	350.000.000,00	349.996.000,00	100,00%
JUMLAH		1.142.133.180,00	1.130.845.140,00	99,01%

Sumber: Data BPKAD Kota Blitar Tahun 2020

Secara umum realisasi anggaran untuk kelurahan Karang Sari adalah sebesar 99,01%. Permasalahan pada Kelurahan Karang Sari antara lain disebabkan oleh:

1. Kegiatan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran sebesar 96,65% dengan uraian anggaran yang tersisa adalah dana pembiayaan rutin seperti tagihan air, listrik, telepon dan internet sesuai kebutuhan.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan/Kelurahan Kegiatan ini terealisasi sebesar 82,64% terdapat alokasi pembiayaan nikah gratis. Di tahun 2020 angka pasangan menikah lebih rendah daripada target.
3. Terdapat sisa dana Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa dan Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa, yang terkendala proses pengajuan SK di Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar.

Tabel 3.4.8
Realisasi Anggaran Kelurahan Sukorejo Tahun 2020

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	392.364.600,00	372.904.706,00	95,04%
1	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	36.215.700,00	35.830.700,00	98,94%
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	0,00	0,00	0,00%
3	Penyediaan Jasa Perkantoran	0,00	0,00	0,00%
4	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	353.280.800,00	334.209.606,00	94,60%
5	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	1.820.900,00	1.817.200,00	99,80%
6	Penyusunan Laporan Keuangan	1.047.200,00	1.047.200,00	100,00%
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	9.615.000,00	9.615.000,00	100,00%
7	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	9.615.000,00	9.615.000,00	100,00%
8	Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.490.500,00	1.481.600,00	99,40%
9	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1.490.500,00	1.481.600,00	99,40%
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	73.121.700,00	71.889.600,00	98,32%
10	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan/Kelurahan	73.121.700,00	71.889.600,00	98,32%
V	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	1.072.273.000,00	1.042.780.900,00	97,25%
11	Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	105.882.600,00	104.246.400,00	98,45%
12	Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	91.847.200,00	86.506.800,00	94,19%
13	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	524.543.200,00	502.979.700,00	95,89%
14	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (DAU Tambahan)	350.000.000,00	349.048.000,00	99,73%
JUMLAH		1.548.864.800,00	1.498.671.806,00	96,76%

Sumber: Data BPKAD Kota Blitar Tahun 2020

Secara umum realisasi anggaran untuk Kelurahan Sukorejo adalah sebesar 96,76%. Permasalahan pada Kelurahan Sukorejo tidak maksimalnya penyerapan anggaran antara lain:

1. Terdapat sisa dana Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa dan Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa, yang terkendala proses pengajuan SK di Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar.
2. Kegiatan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran sebesar 94,60% dengan uraian anggaran yang tersisa adalah dana pembiayaan rutin seperti tagihan air, listrik, telepon dan internet sesuai kebutuhan
3. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (DAU

Tambahan) terdapat sisa anggaran karena penyerapan sesuai harga riil di lapangan.

Tabel 3.4.9
Realisasi Anggaran Kelurahan Tanjungsari Tahun 2020

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	517.337.083,00	447.941.026,00	86,59%
1	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	27.507.283,00	27.435.900,00	99,74%
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	0,00	0,00	0,00%
3	Penyediaan Jasa Perkantoran	0,00	0,00	0,00%
4	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	486.549.000,00	417.224.326,00	85,75%
5	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	1.762.400,00	1.762.400,00	100,00%
6	Penyusunan Laporan Keuangan	1.518.400,00	1.518.400,00	100,00%
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	7.000.000,00	5.000.000,00	71,43%
7	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	7.000.000,00	5.000.000,00	71,43%
8	Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00%
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	2.442.400,00	2.442.400,00	100,00%
9	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	2.442.400,00	2.442.400,00	100,00%
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	62.805.400,00	62.771.700,00	99,95%
10	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan/Kelurahan	62.805.400,00	62.771.700,00	99,95%
V	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	973.952.500,00	939.645.300,00	96,48%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
11	Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	94.179.900,00	77.942.800,00	82,76%
12	Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	119.581.400,00	118.752.600,00	99,31%
13	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	410.191.200,00	393.486.600,00	95,93%
14	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (DAU Tambahan)	350.000.000,00	349.463.300,00	99,85%
JUMLAH		1.563.537.383,00	1.457.800.426,00	93,24%

Sumber: Data BPKAD Kota Blitar Tahun 2020

Secara umum realisasi anggaran untuk kelurahan Tanjungsari adalah sebesar 93,24%. Permasalahan pada Kelurahan Tanjungsari tidak maksimalnya penyerapan anggaran antara lain:

1. Kegiatan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran terdapat sisa dana lelang rehabilitasi rehab atap Kantor Kelurahan Tanjungsari.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum 82,76% tidak terserap maksimal utamanya rapat koordinasi trantibum antara lain sosialisasi pemilukada, sosialisasi lelang bengkok, sosialisasi kegiatan penegakan perda jumlah peserta rapat yang dilibatkan diminimalkan karena mengacu pada aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
3. Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian terserap 71,43% utamanya pada fasilitasi keikutsertaan pada even daerah tidak terserap maksimal karena sesuai edaran WaliKota Blitar tentang penerapan pembatasan kegiatan masyarakat dimaksudkan untuk mengurangi mobilitas sehingga dapat menekan penyebaran penularan covid-19.

Tabel 3.4.10
Realisasi Kinerja & Anggaran Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2020

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Tujuan :							
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan Sukorejo	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Sukorejo	Baik (87)	Baik (90,22)	103,7%	699.414.700,00	633.235.100,00	94,60%
Sasaran 1 :							
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Sukorejo	94%	100%	106,4%			
Program 1.1 :							
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase pelayanan tepat waktu	94%	100%	106,4%	699.414.700,00	633.235.100,00	94,60%
Sasaran 2 :							
Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/keamanan/ketertiban/kesejahteraan sosial/pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	9.221.828.938,00	8.964.839.208,00	97,21%
Program 1.2 :							
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban kesejahteraan sosial, Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	9.221.828.938,00	8.964.839.208,00	97,21%

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.4.11
Pengukuran Efisiensi Kinerja dan Keuangan

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	% Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan Sukorejo	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Sukorejo	103,7	94,60	1,12
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Sukorejo	106,4		
Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/keamanan/ke tertiban/kesejahteraan sosial/ pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100	97,21	1,03

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja Tahun 2020

Suatu keadaan dikatakan memiliki efisiensi jika tingkat efisiensi yang diperoleh lebih dari sama dengan satu. Maka dari sajian data diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Tujuan/Sasaran Strategis 1: Dari tabel 3.4.11 di atas menunjukkan bahwa untuk tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan Sukorejo” dan sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan untuk Kepuasan Masyarakat” tingkat efisiensi Kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,12 dan dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja 106,4% dilaksanakan dengan sumberdaya sebesar 94,60%.
2. Analisis Sasaran Strategis 2: Dari tabel 3.4.10 di atas menunjukkan bahwa untuk sasaran “Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah” tingkat efisiensi Kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1,03 dan dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja 100% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 97,21%.

BAB IV P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorejo tercapai baik dengan hasil nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2020 dengan nilai 90,22. Sedangkan Pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Kecamatan Sukorejo sebesar 103,36%. Nilai tersebut berasal dari rata-rata capaian dari indikator tujuan dan sasaran pada tahun 2020 dengan perincian sebagai berikut :

1. Tujuan:
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan Kecamatan Sukorejo. Dengan target “BAIK” (87) dan terealisasi dengan nilai “BAIK” (90,22), sehingga pencapaiannya sebesar 103,7 %
2. Sasaran I
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat. Dari target 94% terealisasi sebesar 100%. Sehingga pencapaiannya sebesar 106,4%
3. Sasaran II
Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan diwilayah. Dari target 100% terealisasi sebesar 100%. Sehingga pencapaiannya sebesar 100%

4.2 LANGKAH PERBAIKAN

Sesuai dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap kinerja utama Kecamatan Sukorejo, langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat,
Langkah perbaikan:
Meningkatkan kualitas pelayanan, baik dalam hal ketepatan waktu pelayanan, kualitas petugas pelayanan, maupun kualitas dokumen hasil layanan dengan memperhatikan masukan dari pengguna layanan dalam hal ini masyarakat, mulai dari tata tempat, sarana prasarana hingga kualitas waktu pemenuhan hasil layanan dapat ditetapkan dengan meminta saran masyarakat pengguna layanan. Konsep ini lebih humanis karena setiap pencari dapat merasakan pelayanan

Konsep ini lebih humanis karena setiap pencari dapat merasakan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu melalui konsep ini juga memberikan ruang kepada pencari untuk memberikan saran dan kritik guna perbaikan layanan, artinya saran dan kritik yang disampaikan dapat disampaikan kepada penyedia layanan dan wajib ditindaklanjuti segera guna perbaikan layanan.

2. Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah,
Langkah perbaikan:

Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan OPD dan pihak yang terkait sehingga terbentuk sinergi dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Melalui pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Bencana Alam dan Tim Terpadu Penanggulangan Masalah Sosial.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam LKjIP Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2020 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Blitar menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional.

**CAMAT SUKOREJO
KOTA BLITAR**

IUYANTO, SE. MM
Pembina Tk. I
NIP. 19660921 198903 1 009

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
OPD KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : JUYANTO, SE, MM
Jabatan : CAMAT SUKOREJO
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. SANTOSO, M.Pd
Jabatan : WAKIL WALIKOTA BLITAR
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Pjs. WALIKOTA BLITAR



Dr. Ir. JUMADI, M.MT



Blitar, 23 Oktober 2020
PIHAK PERTAMA,
CAMAT SUKOREJO,



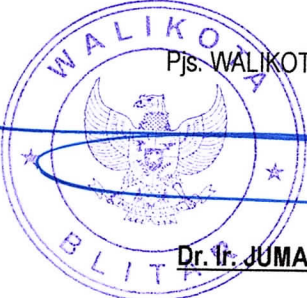
JUYANTO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19660921 198903 1 009



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR
TAHUN 2020**

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik di bidang pelayanan masyarakat Kecamatan Sukorejo	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Baik
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan Kecamatan Sukorejo	94%
3	Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/keamanan/ketertiban/kesejahteraan sosial/ pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Persentase pelayanan tepat waktu	94%
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan	Persentase pembinaan di bidang Pemerintahan, Keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Rp 3.563.325.186,04	APBD
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Rp 92.551.450,00	APBD
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp 21.650.200,00	APBD
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KECAMATAN DAN KELURAHAN	Rp 655.200.800,00	APBD
5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Rp 9.221.829.050,00	APBD
TOTAL		Rp 13.554.556.686,04	


 Pjs. WALIKOTA BLITAR,
Dr. Ir. JUMADI, M.MT

Blitar, 23 Oktober 2020
 PIHAK PERTAMA,
 CAMAT SUKOREJO,

JUYANTO, SE, MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19660921 198903 1 009

**REVIEW MATRIK RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKOREJO
KOTA BLITAR TAHUN 2016 - 2021**

RPJMD KOTA BLITAR					RENCANA STRATEGIS																			
MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN							CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET		
					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	STRATEGI DAN KEBIJAKAN			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan untuk kepuasan masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan kecamatan	Jumlah masyarakat yang puas terhadap layanan kecamatan : Jumlah masyarakat pencari layanan x 100%	70%	72%	90%	92%	95%	98%	Strategi : Penguatan Peran Kelembagaan Kecamatan dan kelurahan terutama dalam meningkatkan kompetensi SDM, menjaga kualitas sarana dan prasarana kantor dalam mendukung eksistensi organisasi pemberi layanan	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Jumlah masyarakat yang puas terhadap pelayanan kecamatan	Fasilitasi Pelayanan Prima	Presentase kelompok sasaran difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					2. Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/keamanan/ketertiban/kesejahteraan sosial/pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	Jumlah koordinasi/pembinaan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh koordinasi/pembinaan x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kebijakan : Penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti di bidang : -pemerintahan dan trantibum -perekonomian dan kesra - pemberdayaan masyarakat dan pembangunan	Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	Jumlah jenis fasilitasi pembinaan pemuda dan olahraga	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis
																	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RKPD	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
																	Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah pelaksanaan musyawarah kecamatan dalam penanggulangan kemiskinan	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
																	Fasilitasi Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	Jumlah jenis kegiatan dalam pelestarian lingkungan hidup	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis
																	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan
																	Fasilitasi Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan	Jumlah kegiatan fasilitasi peningkatan nilai-nilai luhur kebangsaan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan

RPJMD KOTA BLITAR					RENCANA STRATEGIS																				
MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN						CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN						KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
																		Keunggulan yang dilaksanakan							
																		Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Prosentase wajib pajak membayar PBB	100%	100%	100%	100%	100%	100%
																		Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan difasilitasi	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga
																		Evaluasi Kelurahan Berhasil	Jumlah penilaian kelurahan berhasil	7 kelurahan	7 kelurahan	7 kelurahan	7 kelurahan	7 kelurahan	7 kelurahan
																		Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana	7 kelurahan	7 kelurahan	7 kelurahan	7 kelurahan	7 kelurahan	7 kelurahan
																		Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat	Jumlah produk unggulan khas kelurahan yang dihasilkan	7 produk	7 produk	7 produk	7 produk	7 produk	7 produk
																		Penyusunan Profil Kelurahan/ Kecamatan	Jumlah dokumen profil yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
																		Penyusunan Monografi Kelurahan/ Kecamatan	Jumlah dokumen monografi yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
																		Fasilitasi Pelestarian Petilasan Dan Adat	Jumlah kelurahan yang melaksanakan bersih desa	7 kel	7 kel	7 kel	7 kel	7 kel	7 kel
																		Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Jumlah Jenis Pemilihan Umum yang terfasilitasi	-	-	1 jenis	2 jenis	1 jenis	-

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR
TAHUN 2020**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan untuk kepuasan masyarakat	Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan kecamatan	94%	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase pelayanan tepat waktu	94%	Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi	13 pelayanan	315.991.550	Kecamatan Sukorejo
							Jumlah peserta sosialisasi pelayanan kecamatan	150 orang		
							Jumlah P3N/modin nikah yang terfasilitasi	11 orang		
							Jumlah dokumen SKM yang tersusun	1 buku		
							Jumlah aplikasi pelayanan masyarakat yang dikembangkan	-		
	Jumlah dokumen monografi yang tersusun	1 dokumen								
						Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan/Kelurahan	Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi	13 pelayanan	57.780.800	Kelurahan Pakunden
						Jumlah peserta nikah gratis yang terfasilitasi	80 pasang/orang			
						Jumlah dokumen SKM yang tersusun	1 buku			
						Jumlah dokumen monografi yang tersusun	1 dokumen			
						Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan/Kelurahan	Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi	13 pelayanan	25.988.500	Kelurahan Blitar
						Jumlah peserta nikah gratis yang terfasilitasi	28 pasang/orang			
						Jumlah dokumen SKM yang tersusun	1 buku			

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah dokumen monografi yang tersusun	1 dokumen		
						Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan/Kelurahan	Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi	13 pelayanan	19.333.250	Kelurahan Tlumpu
							Jumlah peserta nikah gratis yang terfasilitasi	20 pasang/orang		
							Jumlah dokumen SKM yang tersusun	1 buku		
							Jumlah dokumen monografi yang tersusun	1 dokumen		
						Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan/Kelurahan	Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi	13 pelayanan	38.013.900	Kelurahan Turi
							Jumlah peserta nikah gratis yang terfasilitasi	20 pasang/orang		
							Jumlah dokumen SKM yang tersusun	1 buku		
							Jumlah dokumen monografi yang tersusun	1 dokumen		
						Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan/Kelurahan	Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi	13 pelayanan	53.029.600	Kelurahan Karangsari
							Jumlah peserta nikah gratis yang terfasilitasi	40 pasang/orang		
							Jumlah dokumen SKM yang tersusun	1 buku		
							Jumlah dokumen monografi yang tersusun	1 dokumen		
						Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan/Kelurahan	Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi	13 pelayanan	73.121.700	Kelurahan Sukorejo
							Jumlah peserta nikah gratis yang terfasilitasi	70 pasang/orang		

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah dokumen SKM yang tersusun	1 buku		
							Jumlah dokumen monografi yang tersusun	1 dokumen		
						Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan/Kelurahan	Jumlah pelayanan masyarakat yang difasilitasi	13 pelayanan	62.805.400	Kelurahan Tanjungsari
							Jumlah peserta nikah gratis yang terfasilitasi	60 pasang/orang		
							Jumlah dokumen SKM yang tersusun	1 buku		
							Jumlah dokumen monografi yang tersusun	1 dokumen		
Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/keamanan/ketertiban/kesejahteraan sosial/pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	100%	Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta pembinaan administrasi lapangan kelurahan	200 orang	494.216.500	Kecamatan Sukorejo
							Jumlah Wajib Pajak membayar PBB	16.288 WP		
							Jumlah peserta sosialisasi PBB	100 orang		
							Jumlah peserta lelang bengkok	300 orang		
							Jumlah Patroli Keamanan wilayah	57 patroli		

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah peserta pemantapan petugas Linmas Pamswakarsa	200 orang		
							Jumlah Poskamling yang mengikuti lomba	7 poskamling		
							Jumlah peserta forum keamanan dan ketertiban masyarakat	580 orang		
							Jumlah petugas piket yang difasilitasi	9 orang		
							Jumlah peserta Lomba Baris Berbaris	2 kelompok		
							Jumlah hari fasilitasi Dapur Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum	15 hari		
							Jumlah peserta lomba TPS	7 TPS		
							Jumlah Peserta Sosialisasi Pemilu	300 orang		
							Jumlah monitoring Pemilu	3 monitoring		
							Jumlah peserta prona	100 orang		
						Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah wajib pajak membayar PBB	3.188 WP	81.761.300	Kelurahan Pakunden
							Jumlah Patroli keamanan wilayah	48 patroli		
							Jumlah Peserta Pemantapan petugas Linmas Pamswakarsa	40 orang		
							Jumlah Poskamling yang Mengikuti Lomba	2 poskamling		
							Jumlah peserta Lomba Baris Berbaris	4 kelompok		

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Peserta Forum Keamanan & Ketertiban Masyarakat	10 orang		
							Jumlah petugas piket yang difasilitasi	4 orang		
							Jumlah hari fasilitasi Dapur Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum	10 hari		
							Jumlah TPS yang difasilitasi	36 TPS		
							Jumlah Peserta Simulasi Pemilu	108 orang		
						Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah wajib pajak membayar PBB	1.684 WP	139.101.400	Kelurahan Blitar
							Jumlah Patroli keamanan wilayah	36 patroli		
							Jumlah Peserta Pemantapan petugas Linmas Pamswakarsa	18 orang		
							Jumlah Poskamling yang Mengikuti Lomba	1 poskamling		
							Jumlah peserta Lomba Baris Berbaris	-		
							Jumlah Peserta Forum Keamanan & Ketertiban Masyarakat	10 orang		
							Jumlah petugas piket yang difasilitasi	1 orang		
							Jumlah hari fasilitasi Dapur Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum	6 hari		
							Jumlah TPS yang difasilitasi	16 TPS		
							Jumlah Peserta Simulasi Pemilu	48 orang		

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah wajib pajak membayar PBB	1.620 WP	67.438.750	Kelurahan Tlumpu
							Jumlah Patroli keamanan wilayah	1 patroli		
							Jumlah Peserta Pemantapan petugas Linmas Pamswakarsa	8 orang		
							Jumlah Poskamling yang Mengikuti Lomba	12 poskamling		
							Jumlah peserta Lomba Baris Berbaris	-		
							Jumlah Peserta Forum Keamanan & Ketertiban Masyarakat	100 orang		
							Jumlah petugas piket yang difasilitasi	-		
							Jumlah hari fasilitasi Dapur Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum	6 hari		
							Jumlah TPS yang difasilitasi	12 TPS		
							Jumlah Peserta Simulasi Pemilu	36 orang		
						Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah wajib pajak membayar PBB	920 WP	58.469.000	Kelurahan Turi
							Jumlah Patroli keamanan wilayah	12 patroli		
							Jumlah Peserta Pemantapan petugas Linmas Pamswakarsa	100 orang		
							Jumlah Poskamling yang Mengikuti Lomba	1 poskamling		
							Jumlah peserta Lomba Baris Berbaris	2 kelompok		

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Peserta Forum Keamanan & Ketertiban Masyarakat	75 orang		
							Jumlah petugas piket yang difasilitasi	5 orang		
							Jumlah hari fasilitasi Dapur Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum	6 hari		
							Jumlah TPS yang difasilitasi	10 TPS		
							Jumlah Peserta Simulasi Pemilu	30 orang		
						Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah wajib pajak membayar PBB	1695 WP	102.945.700	Kelurahan Karangsari
							Jumlah Patroli kemananan wilayah	24 patroli		
							Jumlah Peserta Pemantapan petugas Linmas Pamswakarsa	-		
							Jumlah Poskamling yang Mengikuti Lomba	1 poskamling		
							Jumlah peserta Lomba Baris Berbaris	-		
							Jumlah Peserta Forum Keamanan & Ketertiban Masyarakat	100 orang		
							Jumlah petugas piket yang difasilitasi	5 orang		
							Jumlah hari fasilitasi Dapur Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum	6 hari		
							Jumlah TPS yang difasilitasi	18 TPS		
							Jumlah Peserta Simulasi Pemilu	54 orang		

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah wajib pajak membayar PBB	3800 WP	105.882.600	Kelurahan Sukorejo
							Jumlah Patroli keamanan wilayah	40 patroli		
							Jumlah Peserta Pemantapan petugas Linmas Pamswakarsa	14 orang		
							Jumlah Poskamling yang Mengikuti Lomba	1 poskamling		
							Jumlah peserta Lomba Baris Berbaris	2 Kelompok		
							Jumlah Peserta Forum Keamanan & Ketertiban Masyarakat	100 orang		
							Jumlah petugas piket yang difasilitasi	5 orang		
							Jumlah hari fasilitasi Dapur Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum	6 hari		
							Jumlah TPS yang difasilitasi	48 TPS		
							Jumlah Peserta Simulasi Pemilu	144 orang		
						Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah wajib pajak membayar PBB	3460 WP	94.179.900	Kelurahan Tanjungsari
							Jumlah Patroli keamanan wilayah	12 patroli		
							Jumlah Peserta Pemantapan petugas Linmas Pamswakarsa	orang		
							Jumlah Poskamling yang Mengikuti Lomba	2 poskamling		
							Jumlah peserta Lomba Baris Berbaris	-		

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Peserta Forum Keamanan & Ketertiban Masyarakat	100 orang		
							Jumlah petugas piket yang difasilitasi	-		
							Jumlah hari fasilitasi Dapur Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum	6 hari		
							Jumlah TPS yang difasilitasi	28 TPS		
							Jumlah Peserta Simulasi Pemilu	84 orang		
						Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah peserta musyawarah Kecamatan dalam penanggulangan kemiskinan	80 orang	84.748.500	Kecamatan Sukorejo
							Jumlah Peserta Lomba Keolahragaan	14 tim		
							Jumlah Peserta Pembinaan Organisasi Kepemudaan	75 orang		
							Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	4 Kelompok		
							Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	4 Kelompok		
							Jumlah kelompok yang mengikuti pameran	27 kelompok		
							Jumlah Even Nilai-nilai luhur yang diselenggarakan	11 even		
						Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah peserta musyawarah kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan	50 orang	123.554.100	Kelurahan Pakunden

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Peserta Pembinaan Organisasi Kepemudaan	25 orang		
							Jumlah Kelompok yang Mengikuti Pameran	3 kelompok		
							Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan	4 Kelompok		
							yang difasilitasi			
							Jumlah tradisi lokal yang diselenggarakan	1 macam		
							Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan ekonomi lokal	34 orang		
						Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah peserta musyawarah kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan	60 orang	123.574.800	Kelurahan Blitar
							Jumlah Peserta Pembinaan Organisasi Kepemudaan	100 orang		
							Jumlah Kelompok yang Mengikuti Pameran	4 kelompok		
							Jumlah Peserta Lomba Keolahragaan	14 tim		
							Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan	4 Kelompok		
							yang difasilitasi			
							Jumlah tradisi lokal yang diselenggarakan	2 macam		
							Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan ekonomi lokal	40 orang		
						Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah peserta musyawarah kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan	16 orang	102.536.700	Kelurahan Tlumpu

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Peserta Pembinaan Organisasi Kepemudaan	20 orang		
							Jumlah Kelompok yang Mengikuti Pameran	1 kelompok		
							Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	4 Kelompok		
							Jumlah tradisi lokal yang diselenggarakan	1 macam		
							Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan ekonomi lokal	25 orang		
						Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah peserta musyawarah kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan	100 orang	145.345.620	Kelurahan Turi
							Jumlah Peserta Pembinaan Organisasi Kepemudaan	64 orang		
							Jumlah Kelompok yang Mengikuti Pameran	2 kelompok		
							Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	4 Kelompok		
							Jumlah tradisi lokal yang diselenggarakan	2 macam		
							Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan ekonomi lokal	50 orang		
						Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah peserta musyawarah kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan	40 orang	102.111.500	Kelurahan Karang Sari
							Jumlah Peserta Pembinaan Organisasi Kepemudaan	40 orang		

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Kelompok yang Mengikuti Pameran	1 kelompok		
							Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	4 Kelompok		
							Jumlah tradisi lokal yang diselenggarakan	2 tradisi		
							Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan ekonomi lokal	25 orang		
						Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah peserta musyawarah kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan	80 orang	91.847.200	Kelurahan Sukorejo
							Jumlah Peserta Pembinaan Organisasi Kepemudaan	25 orang		
							Jumlah Kelompok yang Mengikuti Pameran	1 kelompok		
							Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi	4 Kelompok		
							Jumlah tradisi lokal yang diselenggarakan	1 macam		
							Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan ekonomi lokal	25 orang		
						Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah peserta musyawarah kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan	150 orang	119.581.400	Kelurahan Tanjungsari
							Jumlah Peserta Pembinaan Organisasi Kepemudaan	80 orang		
							Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan	4 Kelompok		

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							yang difasilitasi			
							Jumlah Kelompok yang Mengikuti Pameran	2 kelompok		
							Jumlah tradisi lokal yang diselenggarakan	1 macam		
							Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan ekonomi lokal	80 orang		
						Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi ppmk	1 buku	2.489.191.100	Kecamatan Sukorejo
							Jumlah peserta bimtek KMPS	60 orang		
							Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang difasilitasi	9 lembaga		
							Jumlah Lokasi kerja bakti	3 lokasi		
							Jumlah jenis Lomba Kelurahan yang difasilitasi	3 lomba		
							Jumlah peserta pembinaan Bank Sampah	70 orang		
							Jumlah KWT yang dibentuk	4 kelompok		
							Jumlah peserta musrenbang RKP tingkat kecamatan	200 orang		
							Jumlah dokumen profil yang tersusun	1 buku, 1 video		
						Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah lokasi pembangunan / pemeliharaan sarana dan prasarana umum	6 lokasi	406.544.800	Kelurahan Pakunden

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang difasilitasi	9 lembaga		
							Jumlah Lokasi kerja bakti	9 lokasi		
							Jumlah jenis lomba kelurahan yang diselenggarakan	4 lomba		
							Jumlah peserta pembinaan kelompok peduli lingkungan tk kelurahan	7 orang		
							Jumlah peserta musrenbang RKPD tingkat kelurahan	80 orang		
							Jumlah dokumen profil yang tersusun	1 buku, 1 video		
						Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah lokasi pembangunan / pemeliharaan sarana dan prasaran umum	8 lokasi	217.914.000	Kelurahan Blitar
							Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang difasilitasi	8 lembaga		
							Jumlah Lokasi kerja bakti	1 lokasi		
							Jumlah jenis lomba kelurahan yang diselenggarakan	1 lomba		
							Jumlah peserta pembinaan kelompok peduli lingkungan tk kelurahan	20 orang		
							Jumlah peserta musrenbang RKPD tingkat kelurahan	70 orang		
							Jumlah dokumen profil yang tersusun	1 buku, 1 video		

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah lokasi pembangunan / pemeliharaan sarana dan prasarana umum	7 lokasi	249.512.188	Kelurahan Tlumpu
							Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang difasilitasi	8 lembaga		
							Jumlah Lokasi kerja bakti	4 lokasi		
							Jumlah jenis lomba kelurahan yang diselenggarakan	-		
							Jumlah peserta pembinaan kelompok peduli lingkungan tk kelurahan	20 orang		
							Jumlah peserta musrenbang RKPd tingkat kelurahan	125 orang		
							Jumlah dokumen profil yang tersusun	1 buku, 1 video		
						Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah lokasi pembangunan / pemeliharaan sarana dan prasarana umum	6 lokasi	251.702.100	Kelurahan Turi
							Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang difasilitasi	8 lembaga		
							Jumlah Lokasi kerja bakti	4 lokasi		
							Jumlah jenis lomba kelurahan yang diselenggarakan	1 lomba		
							Jumlah peserta pembinaan kelompok peduli lingkungan tk kelurahan	20 orang		

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah peserta musrenbang RKPD tingkat kelurahan	625 orang		
							Jumlah dokumen profil yang tersusun	1 buku, 1 video		
						Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah lokasi pembangunan / pemeliharaan sarana dan prasaran umum	10 lokasi	304.400.000	Kelurahan Karang Sari
							Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang difasilitasi	7 lembaga		
							Jumlah Lokasi kerja bakti	8 lokasi		
							Jumlah jenis lomba kelurahan yang diselenggarakan	2 lomba		
							Jumlah peserta pembinaan kelompok peduli lingkungan tk kelurahan	5 orang		
							Jumlah peserta musrenbang RKPD tingkat kelurahan	75 orang		
							Jumlah dokumen profil yang tersusun	1 buku, 1 video		
						Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah lokasi pembangunan / pemeliharaan sarana dan prasaran umum	14 lokasi	561.703.118	Kelurahan Sukorejo
							Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang difasilitasi	6 lembaga		
							Jumlah Lokasi kerja bakti	3 lokasi		
							Jumlah jenis lomba kelurahan yang diselenggarakan	3 lomba		

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah peserta pembinaan kelompok peduli lingkungan tk kelurahan	14 orang		
							Jumlah peserta musrenbang RKPD tingkat kelurahan	500 orang		
							Jumlah dokumen profil yang tersusun	1 buku, 1 video		
						Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah lokasi pembangunan / pemeliharaan sarana dan prasaran umum	10 lokasi	501.911.130	Kelurahan Tanjungsari
							Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang difasilitasi	8 lembaga		
							Jumlah Lokasi kerja bakti	9 lokasi		
							Jumlah jenis lomba kelurahan yang diselenggarakan	5 lomba		
							Jumlah peserta pembinaan kelompok peduli lingkungan tk kelurahan	150 orang		
							Jumlah peserta musrenbang RKPD tingkat kelurahan	100 orang		
							Jumlah dokumen profil yang tersusun	1 buku, 1 video		